

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2024**





RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (RKT BKPK) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan turunan dari dokumen perencanaan kinerja 5 (lima) tahunan (Renstra dan Rencana Aksi Program (RAP), serta penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). RKT BKPK Tahun 2024 memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai BKPK pada tahun 2024 serta anggaran yang dialokasikan. Dokumen RKT diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan perencanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di BKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran dan kerja kerasnya dalam penyusunan RKT BKPK Tahun 2024.

Jakarta, April 2024

Kepala BKPK



Syarifah Liza Munira

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. ORGANISASI	2
BAB II. EVALUASI KINERJA TAHUN 2023	13
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.....	13
B. HAMBATAN DAN REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2023.....	15
BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2024	23
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024	23
B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024.....	24
C. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024.....	25
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024	37
BAB IV. PENUTUP.....	41
LAMPIRAN I	43
LAMPIRAN II	47
DAFTAR KONTRIBUTOR.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pengalihan UPT BKPK Menjadi UPT Labkesmas	5
Tabel I.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024	7
Tabel II.1	Target dan Capaian IKP BKPK Tahun 2023.....	14
Tabel III.1	Indikator Sasaran Strategis BKPK Tahun 2024.....	23
Tabel III.2	Indikator Kinerja Program BKPK Tahun 2024	25
Tabel III.3	Indikator Kinerja Kegiatan BKPK Tahun 2024	30
Tabel III.4	Rencana Anggaran BKPK Tahun 2024	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi BKPK.....	3
--	---

BAB I.

PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap tahun Kementerian/Lembaga harus menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada dokumen rencana strategis masing-masing Kementerian/Lembaga.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan, merupakan dokumen turunan dari dokumen perencanaan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Eselon I; dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Unit Kerja.

RKT merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). RKT dibuat dalam bentuk kegiatan rinci hasil penuangan matriks Renja K/L. Dalam perencanaan kinerja tersebut, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam periode satu tahun.

Keterkaitan RKT dengan Renja-KL harus tercermin pada penggunaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program hingga indikator kinerja, target dan rencana alokasi anggaran tahun anggaran berjalan. Alokasi anggaran dalam RKT sebagai sebuah tahapan perencanaan kinerja dan penganggaran, RKT dan Renja-KL menjadi dokumen yang dapat saling melengkapi dari sisi penjabaran kegiatan dan usulan alokasi anggarannya. Dalam kaitan ini, RKT melengkapi secara rinci menuangkan perencanaan anggaran yang tercermin dalam dokumen Renja-KL.

RKT BKPK Tahun 2024 memuat sasaran kinerja, program kinerja, indikator kinerja, target kinerja periodik, kegiatan/aktivitas dan rincian anggaran BKPK tahun 2024. Dalam penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis kinerja, langkah-langkah atau tahapan tersebut dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), sampai dengan tahapan pelaksanaan atau pencapaian suatu output. Selain itu, Dokumen RKT dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja pada BKPK.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan tujuan:

1. sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan kerja yang

- lebih rinci (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga/RKA-KL)
2. memberikan gambaran pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen BKPK Tahun 2024, dan
 3. dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2024 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Penyusunan dokumen RKT diharapkan memberikan gambaran keselarasan perencanaan kegiatan mulai dari rencana kerja jangka menengah atau 5 (lima) tahunan (RPJMN, Renstra, RAP, dan RAK 2020-2024), sampai dengan rencana kerja tahunan (Renja K/L, RKT, dan RKA-K/L). Dengan demikian, target kinerja tahunan dan jangka menengah dapat dicapai dengan baik.

C. ORGANISASI

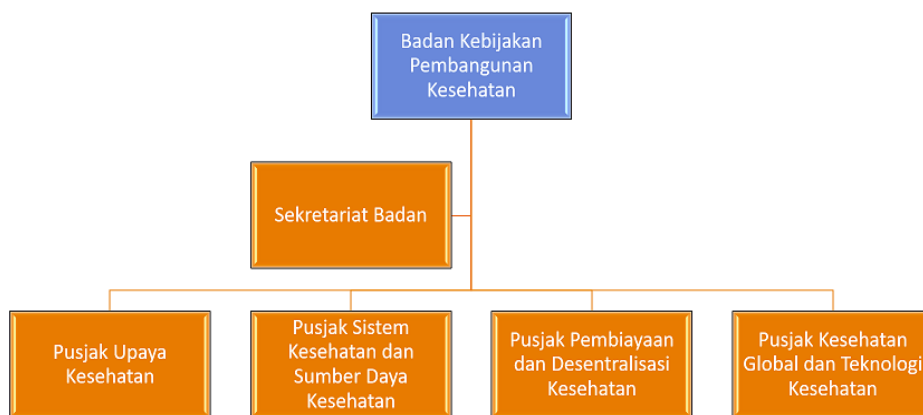
1. Struktur Organisasi

Tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 BKPK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. BKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
- c. kesehatan;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi BKPK terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan;
- c. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan
- e. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.



Gambar I.1 Struktur Organisasi BKPK

Ruang lingkup kebijakan BKPK dijabarkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing Pusjak yang menyesuaikan dengan enam pilar transformasi kesehatan dan penugasan terkait dari Menteri Kesehatan sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan KPK
Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan
2. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 - Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis, dan perumusan rekomendasi kebijakan, diseminasi, advokasi, integrasi, sinergi, dan evaluasi kebijakan di bidang upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
 - Studi dan riset bidang kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1160/2022 tentang Penetapan Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Sebagai Pelaksana Studi dan Riset Bidang Kesehatan)
3. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan, diseminasi, advokasi, integrasi, sinergi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan.
4. Pusat Kebijakan Pembiayaan & Desentralisasi Kesehatan
 - Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan, diseminasi, advokasi, integrasi, sinergi, serta evaluasi kebijakan di bidang pembiayaan, jaminan, dan desentralisasi kesehatan.
 - Kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi)
5. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 - Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis dan perumusan

rekomendasi kebijakan, diseminasi, advokasi, integrasi, sinergi, dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan

- Kerja sama luar negeri (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan Dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi)

Pada tahun 2022-2023, terbit beberapa regulasi terkait Labkesmas sehingga pengelolaan satker UPT BKPK yang pada awalnya berada di bawah ampuan Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dialihkan ke unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan. Regulasi tersebut adalah:

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan, dilakukan pengintegrasian tugas dan fungsi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran terkait pelayanan kesehatan per 1 Juli 2023 di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu (B2P2TOOT) yang telah terintegrasi ke RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan memerlukan unit pelaksana teknis yang mengelola laboratorium di bidang kesehatan lingkungan sehingga dilakukan perubahan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis-fungsional dibina oleh direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola kesehatan masyarakat, yaitu Direktorat Tata Kelola Ditjen Kesehatan Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
Sebagai bentuk penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan diperlukan unit pelaksana teknis yang melakukan pengelolaan laboratorium di bidang biologi kesehatan, sehingga Laboratorium Oemiyati yang semula menjadi bagian dari Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan menjadi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola kesehatan masyarakat, yaitu Direktorat Tata Kelola Ditjen Kesehatan Masyarakat.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat Untuk memperkuat transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan, diperlukan unit pelaksana teknis yang mengelola laboratorium kesehatan masyarakat. UPT Bidang Labkesmas secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola kesehatan masyarakat, yaitu Direktorat Tata Kelola Ditjen Kesehatan Masyarakat dengan rincian perubahan dalam Tabel I.1.

Tabel I.1 Pengalihan UPT BKPK Menjadi UPT Labkesmas

Semula	Menjadi
Balai Litbangkes Magelang	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Magelang
Balai Litbangkes Donggala	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala
Balai Litbangkes Banjarnegara	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara
Balai Litbangkes Aceh	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh
Balai Litbangkes Papua	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Papua
Balai Litbangkes Baturaja	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja
Balai Litbangkes Tanah Bumbu	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu
Loka Litbangkes Pangandaran	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pangandaran
Loka Litbangkes Waikabubak	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak

2. Visi dan Misi

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, yakni “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”. Untuk melaksanakan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkannya dalam visi bidang kesehatan, yaitu “menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan”.

Visi tersebut diwujudkan dengan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni, (i) layanan dasar dan perlindungan sosial, (ii) produktivitas, serta (iii) pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan SDM yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya dalam aspek pembangunan SDM sebagai modal manusia (*human capital*).

Selain itu, Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan misi Presiden tahun 2020- 2024, yakni:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan menjabarkan misi Presiden itu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu, anak, dan remaja
2. Perbaiki gizi masyarakat
3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Germas
5. Memperkuat sistem kesehatan

3. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas, serta penguatan pemberdayaan masyarakat
- 2) Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
- 3) Terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh
- 4) Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan
- 5) Terpenuhinya sdm kesehatan yang kompeten dan berkeadilan
- 6) Terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif.

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Tujuan Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

5. Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu di dalamnya dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Khusus terkait dengan bidang kesehatan, RPJMN 2020-2024 merumuskan arah kebijakan, yaitu “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Arah kebijakan kesehatan nasional tersebut di atas kemudian dirincikan menjadi lima strategi kesehatan nasional yaitu:

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alkes
4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan
5. Revolusi Mental Menuju Smart ASN.

Arah Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepsikan sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau

ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra ini, yaitu dengan rumusan: “Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Arah Kebijakan BKPK adalah:

1. Kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti
2. Kebijakan pembangunan kesehatan yang mencakup kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, lintas K/L dan pemerintah daerah
3. Harmonisasi kebijakan pembangunan kesehatan internal Kementerian Kesehatan, antar K/L, dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan kesehatan.

Strategi BKPK adalah:

1. Mengembangkan lanskap kebijakan
2. Memfasilitasi penyusunan kebijakan mengacu kepada RPJMN, Renstra, dan sasaran prioritas pembangunan kesehatan
3. Menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti
4. Melakukan advokasi rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan
5. Melaksanakan integrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan kesehatan di pusat dan daerah
6. Evaluasi kebijakan pembangunan kesehatan.

BAB II.

**EVALUASI KINERJA
TAHUN 2023**

BAB II. EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021, Badan Litbangkes bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Hal ini berdampak juga pada perubahan tugas dan fungsi Organisasi, yang berakibat pada perubahan Program dan Kegiatan secara menyeluruh.

Sesuai Dokumen Renstra Kemenkes Revisi Tahun 2022-2024, BKPK melaksanakan tiga program, yaitu:

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dengan sasaran terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC. Indikator kinerjanya adalah a) persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan, b) persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan c) persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerja Sama dan Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan.
2. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan sasaran meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti. Indikator kinerjanya adalah a) persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien, b) persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti, dan c) terbangunnya tata kelola kerja sama internasional yang efektif.
3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi dan nilai kinerja anggaran.

Penetapan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan ukuran keberhasilan kerja yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Capaian kinerja IKP BKPK tahun 2023 secara umum dijabarkan pada tabel 11.2 berikut.

Tabel II.1 Target dan Capaian IKP BKPK Tahun 2023

Sasaran Program	IKP	2023		
		Target	Capaian	%
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN				
Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	1. Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining Kesehatan	60	87,1	>120
	2. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM	50	62,8	>120
	3. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan	50	68,5	>120
Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan				
Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	4. Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	100	100	100
	5. Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	40	48,83	>120
	6. Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif	1	1	100
Program Dukungan Manajemen				
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	7. Nilai Reformasi Birokrasi	85	89,50	105,29
	8. Nilai Kinerja Anggaran	93	94,30	101,40

Berdasarkan tabel di atas terlihat hasil penilaian kinerja tahun 2023 Indikator Kegiatan Program (IKP) memiliki sembilan indikator yang terdiri atas indikator pertama Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining Kesehatan dengan capaian 87,1 (>120%), Indikator kedua adalah Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM dengan capaian 62,8

(>120%). Indikator ketiga, Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan dengan capaian 68,5 (>120%). Indikator keempat, Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien tercapai 100 (100%). Indikator ke lima Jumlah pedoman dalam Menyusun kebijakan dengan capaian 1 Pedoman (100%). Indikator ke enam Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti tidak tercapai sesuai target, capaian 9,67 (48,35%). Indikator ke tujuh adalah terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif dengan capaian 1 dokumen (100%). Dua indikator dari program dukungan manajemen hasilnya merupakan capaian output bersama (seluruh Kementerian Kesehatan) yang diampu oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu Indikator Nilai Reformasi Birokrasi dengan nilai capaian 87.50 (93,08%) dan Indikator Nilai Kinerja Anggaran 95,53 (106,14%).

B. HAMBATAN DAN REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2023

Hambatan dan masalah yang dihadapi oleh BKPK dalam mencapai target indikator program tahun 2023 serta rekomendasi solusi yang diberikan sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Penduduk Berisiko yang Mendapatkan Layanan Skrining Kesehatan

Faktor Penghambat Pencapaian Output

Penilaian kelompok berisiko berdasarkan self assessment serta kriteria populasi sasaran untuk 14 penyakit sebagaimana yang dituangkan di Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2090/2023 belum dapat diimplementasikan karena BPJS Kesehatan sebagai penyedia platform skrining riwayat kesehatan masih menunggu terbitnya revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan revisi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019.

Rekomendasi Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Selain mendorong percepatan proses revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun dan revisi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 tahun 2019, Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan sedang membahas perbaikan serta penambahan indikator kinerja FKTP dalam skema Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) agar mencakup upaya pelaksanaan skrining kesehatan oleh FKTP. FKTP akan mendapatkan pembayaran kapitasi lebih besar jika dapat berkinerja baik untuk memenuhi target pelaksanaan skrining pada 14 penyakit. Penambahan indikator diharapkan akan mendorong pemenuhan target pelaksanaan skrining bagi peserta JKN.

Kesiapan FKTP dalam pelaksanaan skrining kesehatan juga menjadi isu penting dalam implementasi skrining agar seluruh peserta dapat mengakses skrining. Untuk itu, diperlukan percepatan dalam pelaksanaan, di antaranya:

- a. Pelaksanaan sosialisasi intens dan penyesuaian regulasi untuk mendorong peran pemerintah daerah memenuhi supply side (SDM, sarana prasarana) pelaksanaan skrining dan pembentukan jejaring untuk pelayanan kesehatan skrining.
- b. Penyesuaian sistem informasi bagi FKTP dan peserta oleh BPJS Kesehatan untuk pelaksanaan skrining riwayat kesehatan, penyesuaian sistem informasi FKTP untuk pencatatan/ pelaporan pelayanan skrining kesehatan dan penyusunan dashboard skrining sebagai tools monitoring skrining untuk pemangku kepentingan terkait.
- c. Percepatan perbaikan skema kapitasi berbasis kinerja dengan menambahkan pelaksanaan skrining sebagai indikator pembayaran.

2. Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Pembiayaan Kegiatan Promotif Preventif pada SPM

Faktor Penghambat Pencapaian Output

Belum adanya regulasi yang mewajibkan kabupaten/kota melakukan perencanaan pembiayaan SPM bidang kesehatan melalui aplikasi Siscobikes.

Rekomendasi Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

- a. Melakukan advokasi dan sosialisasi untuk mendorong komitmen daerah terhadap pelaksanaan SPM bidang kesehatan.
- b. Percepatan proses revisi Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 terkait SPM Kesehatan dengan memasukkan opsi kebijakan yang mewajibkan kabupaten/kota untuk melakukan perencanaan pembiayaan SPM.

3. Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Swasta Bidang Kesehatan

Faktor Penghambat Pencapaian Output

Beberapa hambatan pada pemetaan KPS bidang kesehatan, baik infrastruktur maupun noninfrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah belum memiliki pedoman/petunjuk teknis/peraturan khusus tingkat daerah yang mengatur dan mendukung implementasi KPS bidang kesehatan.
- b. Pemerintah daerah belum memahami terkait implementasi Permenkes Nomor 27 tahun 2022 sehingga belum tampak pembagian peran yang jelas dalam kemitraan pemerintah dengan swasta yang dimaksud.
- c. Belum adanya nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama yang mengikat dan belum ada keberlanjutannya di setiap kerja sama. Kemitraan yang berjalan masih ada yang belum memiliki MoU atau perjanjian kerja sama berupa kesepakatan nonkontraktual. Kemitraan dengan NGO/mitra pembangunan

- bersifat turunan yang sudah ada MoU dari pusat (Kementerian Kesehatan) dan sebagian masuk ke dalam dana hibah.
- d. Belum adanya inventarisasi KPS di daerah karena mekanisme kerja sama tidak mengikat antarsektor yang bermitra.

Rekomendasi Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Dalam upaya percepatan implementasi kemitraan pemerintah dengan swasta untuk mendukung pembiayaan dan pelayanan kesehatan, maka perlu:

- a. Segera untuk mengesahkan Rancangan KMK Komite Pengelola Kemitraan Pemerintah dengan Swasta sebagai tindak lanjut amanah yang tercantum dalam pasal 10 dan 11 Permenkes Nomor 27 Tahun 2022.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan KPS untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai Permenkes Nomor 27 Tahun 2022.
- c. Menyediakan sarana untuk informasi mengenai kebutuhan program yang perlu dikerjasamakan, baik infrastruktur maupun noninfrastruktur.
- d. Pengembangan dashboard KPS yang terintegrasi dengan platform "SATU SEHAT" untuk memantau dan menginventarisasi adanya KPS, baik di pusat maupun daerah.

4. Indikator Persentase Kebijakan Teknis dalam Penguatan Berbagai Skema Pembiayaan Kesehatan yang Efektif Dan Efisien

Faktor Penghambat Pencapaian Output

Pencapaian kegiatan ini berkaitan dengan proses penyusunan rancangan peraturan yang membutuhkan pembahasan dan diskusi yang intensif dan produktif serta membutuhkan waktu yang intens dalam proses pembahasannya.

Rekomendasi Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Berkoordinasi intensif dengan para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan rancangan peraturan baik lintas program, lintas unit, lintas K/L, dan para pakar agar proses pembahasan rancangan peraturan berjalan dengan baik dan lancar.

5. Persentase Kebijakan Kementerian Kesehatan Berbasis Kajian dan Bukti

Faktor Penghambat Pencapaian Output

- a. Transformasi/perubahan organisasi Badan Litbangkes ke BKPK pada tahun 2022 efektif berjalan pada pertengahan tahun (bulan Juli-Desember) menyesuaikan dengan perubahan Renstra Kemenkes di tahun 2022
- b. Arahan pimpinan terhadap konsekuensi adanya transformasi/perubahan organisasi belum mencakup di seluruh lingkungan Kementerian Kesehatan, perubahan baru berdampak di internal BKPK. Sementara perubahan IKK-IKP BKPK mencakup Kementerian Kesehatan.

Rekomendasi Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

- a. Penguatan koordinasi di internal BKPK termasuk dengan seluruh Pusat Kebijakan, terutama terhadap perubahan renstra yang berdampak pada perubahan IKK-IKP BKPK, dimana peran Pusat Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan/kajian/analisis/NA/NU menjadi tuisi utama.
- b. Berkontribusi memberikan masukan pada penyusunan Surat Edaran SOP Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung terlaksananya tuisi utama BKPK untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan/kajian/analisis/NA/NU yang menjadi evidence-based setiap penyusunan regulasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- c. Masukan BKPK terhadap substansi SE SOP, yaitu menambahkan alur mekanisme penyusunan regulasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang meliputi:
 - a) Pembahasan konsep peraturan oleh unit teknis pengusul bersama dengan pakar, pemangku kepentingan, dan lintas unit.
 - b) Kajian/analisis pentingnya dikeluarkannya peraturan yang dikoordinasikan oleh BKPK. Dalam penyusunan kajian/analisis tersebut, BKPK melibatkan unit pemrakarsa, lintas unit terkait, pakar dan pemangku kepentingan terkait;
 - c) Jika memerlukan izin prakarsa, maka penyiapan analisis untuk pendukung surat izin prakarsa diproses pada tahap ini.
 - d) Dalam penyiapan naskah analisis, disertai dengan benchmarking aturan dengan minimal guideline WHO/guideline internasional lainnya dan/atau 2 (dua) negara lain, sesuai dengan kebutuhan.
 - e) Penyiapan naskah analisis yang akan digunakan perancang untuk melakukan penyaringan/uji kelayakan peraturan.

6. Indikator Terbangunnya Tata Kelola Kerja Sama Internasional yang Efektif

Faktor Penghambat Pencapaian Output

Beberapa faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam pencapaian target IKP Pusjak KGTK, antara lain:

- 1) Terbatasnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi dalam bidang diplomasi kesehatan dan kerja sama internasional menjadi hambatan dalam menjalankan program-program kerja sama dengan efektif
- 2) Belum adanya mekanisme pemantauan pelaksanaan kerja sama luar negeri yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan

Rekomendasi Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Untuk menghadapi kendala atau penghambat tersebut dalam pencapaian target Indikator Kinerja Program, antara lain:

- 1) Peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam diplomasi kesehatan dan kerja

sama internasional, salah satunya melalui webinar peningkatan kapasitas diplomasi kesehatan global di lingkungan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan P2KASN

- 2) Pengembangan mekanisme pemantauan yang efektif, sehingga kerja sama internasional di bidang kesehatan dapat berperan secara optimal dalam menjaga kesehatan global dan mencapai tujuan Transformasi Kesehatan yang diinginkan

7. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi

Faktor Penghambat Pencapaian Output

Permasalahan yang terjadi adalah perubahan road map RB nasional sesuai Kemenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 sehingga perlu perubahan road map RB Kemenkes, Penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik masih dalam proses pembahasan dengan Kemenpan RB.

Rekomendasi Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sedang disusun road map RB Kementerian Kesehatan dan melakukan monitor dan koordinasi dengan Biro OSDM Kemenkes terkait evaluasi penilaian RB.

8. Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Faktor Penghambat Pencapaian Target

- a. Penginputan untuk level RO dilakukan di aplikasi SAKTI modul komitmen sehingga terdapat perbedaan dalam mekanisme penginputan capaian output antara penanggung jawab monev dengan operator SAKTI modul komitmen
- b. Kurangnya monitoring dan sinkronisasi dalam proses penginputan sehingga terjadi revisi/perbaikan capaian output di aplikasi SAKTI modul komitmen

Rekomendasi Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang Dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dengan menyamakan persepsi dalam penginputan, melakukan koordinasi dengan operator SAKTI sebelum penginputan, monitoring data di aplikasi SMART DJA setelah dilakukan penginputan di SAKTI serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Roren dan DJA.

BAB III.

**RENCANA KINERJA
TAHUN 2024**

BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024

Rencana kinerja BKKP tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang tertuang pada Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, terdapat enam tujuan dan 15 sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun. BKKP mendukung tujuan ke-4, yaitu terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan, pada sasaran strategis ke-10, yakni terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif; sasaran strategis ke-11, yakni menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien, dan berkeadilan untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC); tujuan ke 6, yakni terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif; serta sasaran strategis ke-16, yakni meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti. Indikator sasaran strategis BKKP tahun 2024 dirinci pada tabel berikut.

Tabel III.1 Indikator Sasaran Strategis BKKP Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Unit Pengampu Utama
4.	terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan			
	4.1. Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	Persentase cakupan kelompok beresiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	100	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	4.2. Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	Proporsi <i>out of pocket</i> (OOP) terhadap total belanja kesehatan	20	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
6.	Terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif			
	6.2. Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Presentasi kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	81	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024

Sasaran strategis kemudian diturunkan menjadi sasaran program dan indikator kinerja program. BKPK sebagai unsur pendukung di Kementerian Kesehatan bertugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Sesuai dokumen Renstra Revisi Tahun 2022-2024, BKPK melaksanakan tiga program, yaitu:

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dengan sasaran terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC.
2. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan sasaran meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti.
3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Ketiga program yang dilaksanakan oleh BKPK yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Program (IKP) yang dirinci sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
 - a. Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan.
 - b. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM.
 - c. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kerja sama pemerintah swasta (KPS) bidang kesehatan
2. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - a. Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien
 - b. Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan
 - c. Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti
 - d. Terbangunnya tata kelola kerja sama internasional yang efektif
3. Program Dukungan Manajemen
 - a. Nilai reformasi birokrasi
 - b. Nilai kinerja anggaran

Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai dengan definisi operasional yang tercantum pada dokumen Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 (revisi), yaitu hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kesehatan pada tahun berjalan. Program ini akan diturunkan untuk menggambarkan kontribusi kinerja masing-masing Eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan (*crosscutting*) terkait nilai reformasi birokrasi dan kinerja anggaran Eselon 1 tercantum pada IKP BKPK.

Tabel III.2 Indikator Kinerja Program BKPK Tahun 2024

No.	Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2024	
1.	Pelayanan Kesehatan dan JKN			
	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC	a.	Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	100
		b.	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM	75
		c.	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan	100
2.	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan			
	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	a.	Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	100
		b.	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	-
		c.	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	100
d.		Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif	1	
3.	Program Dukungan Manajemen			
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	a.	Nilai Reformasi Birokrasi	98
b.		Nilai Kinerja Anggaran	95	

C. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024

Sesuai dokumen Renstra Kemenkes Revisi Tahun 2020-2024, BKPK melaksanakan 3 Sasaran Strategis, yaitu 1) Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif, 2) Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), 3) Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti. Disamping itu BKPK juga mendukung pencapaian satu sasaran strategis yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu 1) Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik, ini merupakan dukungan BKPK, sekaligus menggambarkan crosscutting terhadap Indikator Kinerja Program yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Kinerja Anggaran lingkup Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh

Sekretariat Jenderal. Untuk menjamin tercapainya Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Rencana Kegiatan Tahun 2024 BKPK menggambarkan turunan dari sasaran strategis hingga sasaran kegiatan BKPK tahun 2024 yang dirinci sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis: Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
 1. Indikator Sasaran Strategis: Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
 2. Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN
Sasaran Program: Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC.
IKP:
 - 1) Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
 - 2) Kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM.
 3. Kegiatan: Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Sasaran kegiatan: Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan Kesehatan.
Pelaksana: Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan.
IKK:
 - 1) Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
 - 2) Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN
 - 3) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account/ District Health Account (PHA/DHA)
 - 4) Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni
 - 5) Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
 - 6) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas
 - 7) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit
- b. Sasaran Strategis: Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC)
 1. Indikator Sasaran Strategis: Proporsi *Out Of Pocket* (OOP) terhadap total belanja kesehatan

2. Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN
 Sasaran Program: Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC
 IKP:
 - 1) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan
 3. Kegiatan: Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 Sasaran kegiatan: Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan Kesehatan
 Pelaksana: Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
 IKK:
 - 1) Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
 - 2) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas
 - 3) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit
- c. Sasaran Strategis: Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
1. Indikator Sasaran Strategis: Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan
 2. Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 Sasaran Program: Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
 IKP:
 - 1) Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien
 - 2) Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan
 - 3) Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti
 - 4) Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif
 3. Kegiatan:
 - 1) Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan
 Sasaran kegiatan: Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan
 Pelaksana: Sekretariat BKPK
 Indikator:
 - 1) Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman.
 - 2) Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan
 Sasaran kegiatan: Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti
 Pelaksana: Pusjak Upaya Kesehatan

- 1) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 3) Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Upaya Kesehatan
- 5) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan

3) Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Sasaran kegiatan: Meningkatnya kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan berbasis bukti

Pelaksana: Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Indikator:

- 1) Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 3) Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- 5) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan

4) Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan
Sasaran kegiatan ke-1: Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan Kesehatan

Pelaksana: Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

- 1) Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T- 1)
- 2) Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi
- 3) Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya

Sasaran kegiatan ke-2: Meningkatnya kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan berbasis bukti

Pelaksana: Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

Indikator:

- 1) Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti

- 2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
 - 3) Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
 - 4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan
 - 5) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan
- 5) Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 Sasaran kegiatan: Meningkatnya kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berbasis bukti
 Pelaksana: Pusjak Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 Indikator:
- 1) Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
 - 2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
 - 3) Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
 - 4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 - 5) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi Kesehatan
 - 6) Tersusunnya blue print pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga
 - 7) Jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan

d. Sasaran Strategis: Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik

1. Indikator Sasaran Strategis: Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik

2. Program: Dukungan Manajemen

Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

IKP:

1) Nilai Reformasi Birokrasi

2) Nilai Kinerja Anggaran

3. Kegiatan:

Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Pelaksana: Sekretariat BKPK

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- 2) Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Tabel III.3 Indikator Kinerja Kegiatan BKPK Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
III	Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN			Ditjen Yankes, Ditjen Farmalkes, Ditjen Nakes, Ditjen Kesmas, BKPK dan Setjen
	Sasaran Program: Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC			Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	P 1	Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	100	
	2	Persentase kabupaten/ kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM	75	
	3	Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan	100	
13	Kegiatan Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan			Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
a	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan	Pusat dan daerah		
	1) Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan *(III.P.1)		100	
	2) Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN *(III.P.1)		15	
	3) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account/ District Health Account (PHA/ DHA) *(III.P.2)		100	
	4) Persentase kabupaten/ kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD murni *(III.P.2)		100	
	5) Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan *(III.P.3)		100	
	6) Persentase kabupaten/ kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas *(III.P.3)		100	
	7) Persentase kabupaten/ kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit *(III.P.3)		100	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
V	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan			Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	Sasaran Program : Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti			Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	A			
	1	Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	100	
	2	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan		
	3	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	100	
	4	Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif	1	
1	Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan			Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	Sasaran kegiatan Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	Pusat		
	a			
	1)	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman *(V.A.2)	100	
2	Kegiatan Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan			Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti	Pusat dan daerah		
	a			
	1) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	3) Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Upaya Kesehatan*(V.A.3)		100	
	5) Persentase kabupaten/ kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan *(V.A.3)		100	
3	Kegiatan Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan			Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
a	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Pusat		
	1) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	3) Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan *(V.A.3)		100	
	5) Persentase kabupaten/ kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan *(V.A.3)		100	
4	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Pembiayaan Jaminan, dan Desentralisasi Kesehatan			Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
a	Sasaran Kegiatan : Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan	Pusat		
	1) Annual review tarif INA- CBGs dan NHA (T- 1) *(V.A.1)		2	
	2) Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi *(V.A.1)		20	
	3) Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya *(V.A.1)		1	
b	Meningkatnya kebijakan pembiayaan, jaminan dan desentralisasi kesehatan berbasis bukti	Pusat		
	1) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	3) Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan *(V.A.3)		100	
5) Persentase kabupaten/ kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan *(V.A.3)		100		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
5	Kegiatan Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan			Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
a	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kebijakan kesehatan global dan teknologi kesehatan berbasis bukti	Pusat		
	1) Tersusunnya blueprint pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga *(V.A.4)		1	
	2) Jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan *(V.A.4)		10	
	3) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	4) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	5) Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti *(V.A.3)		100	
	6) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan *(V.A.3)		100	
	7) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan *(V.A.3)		100	
VI	Program Dukungan Manajemen			Seluruh Unit Utama/ Eselon 1

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana
B	Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan			Sekretariat Jenderal
	1 Nilai Reformasi Birokrasi		98	
	2 Nilai Kinerja Anggaran		95	
19	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
a	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pusat		
	1) Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan *(VI.B.1)		36,1	
	2) Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan *(VI.B.2)		91	

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Anggaran BKPK yang disetujui tahun 2024 sebesar Rp 462.942.252.000,- (empat ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Anggaran ini digunakan untuk tiga Program dan tujuh kegiatan utama dengan rincian pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel III.4 Rencana Anggaran BKPK Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (ribuan)
I.	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	19.268.200
	1. Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	19.268.200

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (ribuan)
	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	361.197.143
1.	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	255.892.759
2.	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	17.705.800
3.	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	9.104.707
4.	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	61.238.950
5.	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	17.254.927
II.	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	
1.	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	255.892.759
2.	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	17.705.800
3.	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	9.104.707
4.	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	61.238.950
5.	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	17.254.927
III.	Program Dukungan Manajemen	82.476.909
1.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	82.476.909
Total Anggaran		462.942.252

BAB IV.

PENUTUP



BAB IV. PENUTUP

Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan meliputi pelaksanaan penyusunan kebijakan berbasis bukti, baik berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pengkajian kesehatan, juga berdasarkan data informasi lain yang relevan mencakup kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, sektor lain (Kementerian dan Lembaga) dan pemerintah daerah. dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan, diperlukan harmonisasi kebijakan Kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah untuk mendorong mengoptimalkan dana fungsi kesehatan dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan kesehatan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas keselarasan perencanaan dan penganggaran pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, serta dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di BKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Kami tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang berkontribusi atas penyusunan dokumen RKT BKPK Tahun 2024 ini. Besar harapan kami dokumen ini dapat bermanfaat. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, tim penyusun menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan atau penyempurnaan dokumen RKT BKPK tahun 2024 sangat diharapkan agar dokumen RKT ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN I

RENJA KL PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 16 - Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
 3. PROGRAM : Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	325.037.744,0
03.03	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	325.037.744,0
Total		325.037.744,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti		446.239.433,0
01.01	Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	100	
01.03	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	100	
01.04	Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif	1	
Total			446.239.433,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Kebijakan Bidang Kesehatan	446.239.433,0
01.01	Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
01.02	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	
01.03	Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif	
Total		446.239.433,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2025	2026	2027
6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	254.893.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254.893.640,0	254.893.640,0	254.893.640,0	251.526.383,0
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	106.308.982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106.308.982,0	18.428.938,0	18.428.938,0	4.171.629,0
6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	13.872.825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.872.825,0	16.425.659,0	17.247.127,0	18.109.483,0
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	52.238.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52.238.950,0	52.238.950,0	52.238.950,0	51.054.186,0
6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	18.925.036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.925.036,0	10.365.083,0	10.365.083,0	10.365.083,0
Total		446.239.433,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446.239.433,0	352.352.270,0	353.173.738,0	335.226.764,0

Jakarta, 05 Juli 2023
 Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan



LAMPIRAN II

DIPA BKPK TAHUN 2024



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



DS-3072-2592-6163-4006

NOMOR : SP DIPA- 024.11.1.416151/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 2. Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 4. Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
- Sebesar : Rp. 462.942.252.000 (EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN
07.90 KESEHATAN LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	462.942.252.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VII (182) Rp. 462.942.252.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024



DS-3072-2592-6163-4006

Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	17.000.082.000
DG.6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp.	17.000.082.000
DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp.	364.136.251.000
DS.6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	Rp.	254.893.640.000
DS.6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Rp.	17.705.800.000
DS.6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	Rp.	11.372.825.000
DS.6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	Rp.	61.238.950.000
DS.6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Rp.	18.925.036.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	81.805.919.000
WA.6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp.	81.805.919.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 1

Program	: 024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		17.000.082.000
Kegiatan	: 6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		17.000.082.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan		
	: 2. 02	Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN		
	: 3. 03	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account / District Health Account (PHA/DHA)		
	: 4. 04	Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni		
	: 5. 05	Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan		
	: 6. 06	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas		
	: 7. 07	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 6804.AEA	Koordinasi	8,00 kegiatan	9.583.051.000
Rincian Output	: 01	AEA.001 Koordinasi Pengembangan Penilaian Teknologi Kesehatan (PK-19)	2,00 kegiatan	3.030.800.000
	: 02	AEA.002 Pengembangan Grouper INA CBG (PK-33)	1,00 kegiatan	930.540.000
	: 03	AEA.003 Audit Koding di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (PK-33)	1,00 kegiatan	361.870.000
	: 04	AEA.004 Penyusunan Regulasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (PK-20)	1,00 kegiatan	443.000.000
	: 05	AEA.005 Fasilitas Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan (PK-20)	1,00 kegiatan	1.184.891.000
	: 06	AEA.006 Konsolidasi Penyusunan National Health Account (PK-17)	1,00 kegiatan	1.741.980.000
	: 07	AEA.007 Penguatan Pelaksanaan Health Account (PHA/DHA) di Daerah (PK-17)	1,00 kegiatan	1.889.970.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 6804.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1.500,00 orang	2.186.420.000
Rincian Output	: 01	AEF.001 Advokasi Pembiayaan Kesehatan kepada Daerah untuk Kegiatan Promotif dan Preventif	1500,00 orang	2.186.420.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output 3	: 6804.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	300,00 Orang, Kegiatan	4.990.611.000
Rincian Output	: 01	DCM.001 Pelatihan Koding bagi Tenaga Koder di FKRTL dalam Program JKN (PK-33)	300,00 Orang	4.990.611.000
Klasifikasi Rincian Output 4	: 6804.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Rekomendasi	240.000.000
Rincian Output	: 01	FAE.001 Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1,00 Laporan	240.000.000
Program	: 024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan		364.136.251.000
Kegiatan	: 6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan		254.893.640.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti		
	: 2. 02	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti		
	: 3. 03	Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti		
	: 4. 04	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan		
	: 5. 05	Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 6833.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	12,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.188.715.000
Rincian Output	: 01	ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Layanan Primer (LP-1)	1,00 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	: 02	ABG.002 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Labkesmas (LP-2)	1,00 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	: 03	ABG.003 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Jejaring Layanan Rujukan (LR-11)	1,00 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	: 04	ABG.004 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Transformasi RS Vertikal (LR-12)	1,00 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	: 05	ABG.005 Rekomendasi Kebijakan Penurunan Stunting (LP-4)	2,00 Rekomendasi Kebijakan	1.200.000.000
	: 06	ABG.006 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Imunisasi (LP-5)	1,00 Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	: 07	ABG.007 Rekomendasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (LP-9)	2,00 Rekomendasi Kebijakan	1.200.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 3

Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan, Kajian	
08	ABG.008	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Promosi Kesehatan dan PTM (LP-10)	2,00 Rekomendasi Kebijakan 1.200.000.000
09	ABG.009	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Kajian Kontigensi Bidang Upaya Kesehatan (LP-1)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 3.588.715.000
Klasifikasi Rincian Output	2	6833.AEA Koordinasi	2,00 kegiatan 10.367.257.000
Rincian Output	01	AEA.001 Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	1,00 kegiatan 3.367.257.000
	02	AEA.002 Manajemen Persiapan Survei Konsumsi Masyarakat Indonesia (SKMI) (LP-4)	1,00 kegiatan 7.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	6833.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	2,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 234.337.668.000
Rincian Output	01	PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia (LP-4) (PN)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 210.762.930.000
	02	PBG.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Vaksin Covid-19 Melalui Uji Klinik Vaksin Merah Putih (Inavac) (RF-14) (PN)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 23.574.738.000
Kegiatan	6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	17.705.800.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	
	2. 02	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	
	3. 03	Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	
	4. 04	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	
	5. 05	Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	
Klasifikasi Rincian Output	4	6834.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	11,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 11.914.310.000
Rincian Output	01	ABG.001 Rekomendasi kebijakan pemenuhan kebutuhan 40 obat esensial produksi dalam negeri (RF-13)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 600.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 4

Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan, Kajian	
02	ABG.002	Rekomendasi kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Alat Kesehatan (RF -15)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 700.000.000
03	ABG.003	Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan 14 antigen vaksin (RF -14)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 1.500.000.000
04	ABG.005	Rekomendasi Kebijakan terkait Perencanaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan (SDM-22)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 569.170.000
05	ABG.006	Rekomendasi Kebijakan Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Medis (SDM-21)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 635.830.000
06	ABG.007	Rekomendasi Kebijakan terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (SDM 23)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 609.310.000
07	ABG.008	Rekomendasi Kebijakan Biorepository dalam kesiapsiagaan terhadap ancaman bioterorisme (LP 2)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 1.000.000.000
08	ABG.009	Rekomendasi Kebijakan Implementasi International Health Regulation (IHR) dalam kesiapsiagaan penyakit berpotensi wabah dan pandemi (LP-2)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 1.000.000.000
09	ABG.011	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Kajian Kontigensi Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (LP-2)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 4.300.000.000
10	ABG.031	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (SDM-23)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 500.000.000
11	ABG.032	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Alat Kesehatan (RF-15)	1,00 Rekomendasi Kebijakan 500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	6834.AEA Koordinasi	1,00 kegiatan 3.791.490.000
Rincian Output	01	AEA.002 Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	1,00 kegiatan 3.791.490.000
Klasifikasi Rincian Output	6	6834.CAB Sarana Bidang Kesehatan	1,00 Paket, Unit 2.000.000.000
Rincian Output	01	CAB.002 Penyelenggaraan Biomedical Genome Based Science Initiative (BGSI)	1,00 Paket 2.000.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 5

Kegiatan	: 6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan			11.372.825.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T- 1)			
	: 2. 01	Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 3. 02	Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi			
	: 4. 02	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 5. 03	Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya			
	: 6. 03	Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 7. 04	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan			
	: 8. 05	Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output	7	6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	3,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.707.323.000
Rincian Output	: 01	ABG.003 Rekomendasi Kebijakan Dewan Pertimbangan Klinis	1,00	Rekomendasi Kebijakan	550.000.000
	: 02	ABG.004 Rekomendasi Kebijakan Penataan Ulang Manfaat JKN (PK-18)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.077.750.000
	: 03	ABG.009 Rekomendasi Kebijakan Sinergi Pembiayaan Pusat dan Daerah (PK-20)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.079.573.000
Klasifikasi Rincian Output	8	6835.AEA Koordinasi	2,00	kegiatan	4.568.608.000
Rincian Output	: 01	AEA.001 Integrasi dan Sinergi dalam rangka Pencapaian Pembangunan Kesehatan	1,00	kegiatan	2.635.638.000
	: 02	AEA.002 Penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan dan Penguatan Sistem Kesehatan (PK-20)	1,00	kegiatan	1.932.970.000
Klasifikasi Rincian Output	9	6835.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.096.894.000
Rincian Output	: 01	PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Penilaian Teknologi Kesehatan (PK-19) (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	558.508.000
	: 02	PBG.002 Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Nasional Health Account (NHA) (PK-17) (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	186.810.000
	: 03	PBG.003 Rekomendasi Kebijakan Sinergisme Kerjasama Pemerintah dan (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	665.432.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 6

		Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan, Kajian	
		Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (PK-20)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	
	: 04	PBG.004 Rekomendasi Kebijakan Utilization Review dalam Pengendalian Kuratif dalam JKN (PK-18) (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	700.680.000
	: 05	PBG.005 Rekomendasi Kebijakan Annual Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dan Kapitasi pada Program JKN (PK-18) (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.985.464.000
Kegiatan	: 6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan			61.238.950.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 2. 02	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 3. 03	Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti			
	: 4. 04	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan			
	: 5. 05	Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan			
	: 6. 06	Tersusunnya blue print pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga			
	: 7. 07	Jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output	10	6836.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	19,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.697.080.000
Rincian Output	: 01	ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Implementasi Kesepakatan/Kebijakan/Inisiatif Kesehatan Global yang Mendukung Transformasi Kesehatan Nasional (HS-32)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	837.990.000
	: 02	ABG.009 Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Implementasi Rekam Medik Elektronik (RME) di Fasyankes (TK 31)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	429.450.000
	: 03	ABG.017 Rekomendasi Kebijakan Perkembangan Nutrigenomic di Indonesia (TK 25)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	391.990.000
	: 04	ABG.019 Rekomendasi Kebijakan Perdagangan Bilateral Sektor Barang dan Jasa Bidang Kesehatan (RF 15)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	388.080.000
	: 05	ABG.022 Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Kerja Sama Regional untuk Transformasi Kesehatan (HS 29)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	408.180.000
	: 06	ABG.023 Rekomendasi Kebijakan Operasionalisasi ACPHEED dan ABVC	1,00	Rekomendasi Kebijakan	428.280.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS-3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 7

Kebijakan Bidang Kesehatan			Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
		di Indonesia (HS 32)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	
07	ABG.024	Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Kajian Kontigensi Bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (HS 31)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.307.100.000
08	ABG.025	Rekomendasi kebijakan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri (HS 32)	3,00	Rekomendasi Kebijakan	1.155.210.000
09	ABG.026	Rekomendasi kebijakan Evaluasi implementasi platform Satu Sehat (TK 31)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	926.500.000
10	ABG.027	Rekomendasi Kebijakan Terkait Pelaksanaan Teknologi WGS di Rumah Sakit (TK 25)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	818.540.000
11	ABG.028	Rekomendasi Kebijakan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Teknologi Vaccine Therapeutic dan Diagnostic (VTD) dan fraksionasi plasma di Indonesia (RF 14)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	801.340.000
12	ABG.029	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan kerja sama bilateral untuk peningkatan layanan kesehatan dan inovasi (LR-12)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	804.420.000
Klasifikasi Rincian Output	11	6836.AEA Koordinasi	1,00	kegiatan	1.555.250.000
Rincian Output		01 AEA.001 Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	1,00	kegiatan	1.555.250.000
Klasifikasi Rincian Output	12	6836.AEC Kerja sama	25,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	33.747.286.000
Rincian Output		01 AEC.003 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan (HS-32)	3,00	Dokumen	884.510.000
		02 AEC.005 Dokumen Pinjaman Hibah Luar Negeri (HS-32)	2,00	Dokumen	863.760.000
		03 AEC.006 Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan (TK-25)	2,00	Dokumen	1.952.340.000
		04 AEC.007 Blueprint Pengelolaan Kerja sama Internasional (HS-32)	1,00	Dokumen	856.052.000
		05 AEC.008 Jejaring Internasional Health Resiliency Rapid Response and Recovery Kedaruratan Kesehatan (HS-32)	10,00	Kesepakatan	1.718.513.000
		06 AEC.009 Dokumen Kerjasama Kesehatan Global dan Teknologi Terkait Biomedical Genome Science Initiative (TK 25)	1,00	Dokumen	1.220.631.000
		07 AEC.011 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan	2,00	Dokumen	904.980.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS-3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 8

Kebijakan Bidang Kesehatan			Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan		
		(RF-14)	2,00	Dokumen	
08	AEC.012	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan (RF-14)	2,00	Dokumen	846.500.000
09	AEC.013	Operasionalisasi ACPHEED (HS29)	1,00	Kegiatan	9.000.000.000
10	AEC.014	Kontribusi Indonesia (HS 32)	1,00	Kegiatan	15.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	6836.AEG Konferensi dan Event	6,00	Kegiatan, Paket Kegiatan	16.309.598.000
Rincian Output		01 AEG.001 Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (HS 32)	2,00	Kegiatan	8.913.258.000
		02 AEG.002 Pertemuan Joint Working Group (HS 32)	1,00	Kegiatan	1.736.360.000
		03 AEG.003 Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS 32)	3,00	Kegiatan	5.659.980.000
Klasifikasi Rincian Output	14	6836.AEH Promosi	1,00	promosi, Kegiatan	929.736.000
Rincian Output		01 AEH.001 Pelaksanaan Promosi dalam rangka mendorong investasi produksi alkes dalam negeri (RF 15)	1,00	Kegiatan	929.736.000
Kegiatan		6837 Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan			18.925.036.000
Indikator Kinerja Kegiatan		1. 01 Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman			
Klasifikasi Rincian Output	15	6837.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	13.149.833.000
Rincian Output		01 ABG.001 Analisis Situasi Kesehatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	13.149.833.000
Klasifikasi Rincian Output	16	6837.AEA Koordinasi	2,00	kegiatan	5.775.203.000
Rincian Output		01 AEA.001 Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan	1,00	kegiatan	3.029.743.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 9

		Koordinasi	kegiatan			
	02	AEA.002	Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1.00	kegiatan	2.745.460.000
Program	:	024.11.WA	Program Dukungan Manajemen			81.805.919.000
Kegiatan	:	6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			81.805.919.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			
		2. 02	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output	1	6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	22.00	Unit	2.195.407.000
Rincian Output	:	01	CAN.951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	22.00	Unit	2.195.407.000
Klasifikasi Rincian Output	2	6797.CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.00	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	770.200.000
Rincian Output	:	01	CBT.971 Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.00	Unit	770.200.000
Klasifikasi Rincian Output	3	6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	23.00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	61.008.467.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	1.058.686.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	977.498.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5.00	Layanan	2.676.662.000
		04	EBA.959 Layanan Protokol	1.00	Layanan	2.957.744.000
		05	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	841.816.000
		06	EBA.962 Layanan Umum	4.00	Layanan	931.087.000
		07	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4.00	Layanan	541.010.000
		08	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	352.634.000
		09	EBA.994 Layanan Perkantoran	5.00	Layanan	50.671.330.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 10

		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			
Klasifikasi Rincian Output	4	6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	23.00	Unit, m2, Paket	6.850.830.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	22.00	Unit	4.228.530.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	2.622.300.000
Klasifikasi Rincian Output	5	6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	680.00	Orang, Layanan, Rekomendasi	4.948.429.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	680.00	Orang	4.948.429.000
Klasifikasi Rincian Output	6	6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	51.00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.032.586.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11.00	Dokumen	2.976.097.000
		02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	11.00	Dokumen	1.158.730.000
		03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	18.00	Dokumen	1.420.796.000
		04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	2.00	Dokumen	238.901.000
		05	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	9.00	Dokumen	238.062.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kuntha Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024**



I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I B. 1

		Rp.	462.942.252.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0 Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.		462.942.252.000		(2) RPLN	US\$		0 Rp.		0
1. Rupiah Murni	Rp.		462.942.252.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0 Rp.		0
2. PNBP	Rp.		0		(2) RHLN	US\$		0 Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.		0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.		0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0		0
5. Hibah Langsung	Rp.		0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0		0
6. SBSN PBS	Rp.		0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0		0

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024**



II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	-	454.091.842	8.850.410	-	-	462.942.252		
024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	-	17.000.082	-	-	-	17.000.082		
6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	-	17.000.082	-	-	-	17.000.082		
6804.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.583.051	-	-	-	9.583.051	01.51	
01	RM	-	9.583.051	-	-	-	9.583.051	182	
6804.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.186.420	-	-	-	2.186.420	01.51	
01	RM	-	2.186.420	-	-	-	2.186.420	182@	
6804.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.990.611	-	-	-	4.990.611	01.51	
01	RM	-	4.990.611	-	-	-	4.990.611	182@	
6804.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	240.000	-	-	-	240.000	01.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [5]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	240.000	-	-	-	240.000	182	
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	363.676.251	460.000	-	-	364.136.251		
6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	-	254.433.640	460.000	-	-	254.893.640		
6833.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	10.188.715	-	-	-	10.188.715	01.51	
01 RM		-	10.188.715	-	-	-	10.188.715	182	
6833.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	10.367.257	-	-	-	10.367.257	01.51	
01 RM		-	10.367.257	-	-	-	10.367.257	182@	
6833.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	233.877.668	460.000	-	-	234.337.668	01.51	
01 RM		-	233.877.668	460.000	-	-	234.337.668	182@	
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	-	17.705.800	-	-	-	17.705.800		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH [5]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6834.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	11.914.310	-	-	-	11.914.310	01.51	
01 RM		-	11.914.310	-	-	-	11.914.310	182@	
6834.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.791.490	-	-	-	3.791.490	01.51	
01 RM		-	3.791.490	-	-	-	3.791.490	182	
6834.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01.51	
01 RM		-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	182	
6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	-	11.372.825	-	-	-	11.372.825		
6835.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.707.323	-	-	-	2.707.323	01.51	
01 RM		-	2.707.323	-	-	-	2.707.323	182	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6835.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.568.608	-	-	-	4.568.608	01.51	
01	RM	-	4.568.608	-	-	-	4.568.608	182@	
6835.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.096.894	-	-	-	4.096.894	01.51	
01	RM	-	4.096.894	-	-	-	4.096.894	182	
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	-	61.238.950	-	-	-	61.238.950		
6836.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	8.697.080	-	-	-	8.697.080	01.51	
01	RM	-	8.697.080	-	-	-	8.697.080	182	
6836.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.555.250	-	-	-	1.555.250	01.51	
01	RM	-	1.555.250	-	-	-	1.555.250	182	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6836.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	33.747.286	-	-	-	33.747.286	01.51	
01	RM	-	33.747.286	-	-	-	33.747.286	182@	
6836.AEG	Konferensi dan Event (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	16.309.598	-	-	-	16.309.598	01.51	
01	RM	-	16.309.598	-	-	-	16.309.598	182	
6836.AEH	Promosi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	929.736	-	-	-	929.736	01.51	
01	RM	-	929.736	-	-	-	929.736	182	
6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	-	18.925.036	-	-	-	18.925.036		
6837.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.149.833	-	-	-	13.149.833	01.51	
01	RM	-	13.149.833	-	-	-	13.149.833	182@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6837.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.775.203	-	-	-	5.775.203	01.51	
01	RM	-	5.775.203	-	-	-	5.775.203	182	
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	73.415.509	8.390.410	-	-	81.805.919		
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	73.415.509	8.390.410	-	-	81.805.919		
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	543.586	1.651.821	-	-	2.195.407	01.51	
01	RM	-	543.586	1.651.821	-	-	2.195.407	182	
6797.CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	770.200	-	-	-	770.200	01.51	
01	RM	-	770.200	-	-	-	770.200	182	
6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	60.955.967	52.500	-	-	61.008.467	01.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	60.955.967	52.500	-	-	61.008.467	182@	
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	164.741	6.686.089	-	-	6.850.830	01.51	
01	RM	-	164.741	6.686.089	-	-	6.850.830	182	
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.948.429	-	-	-	4.948.429	01.51	
01	RM	-	4.948.429	-	-	-	4.948.429	182	
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.032.586	-	-	-	6.032.586	01.51	
01	RM	-	6.032.586	-	-	-	6.032.586	182	
JUMLAH		-	454.091.842	8.850.410	-	-	462.942.252		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS.3072-2392-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN														
		RENCANA PENARIKAN DANA	11.330.486	14.390.245	19.010.706	21.824.563	22.236.010	18.993.791	46.253.331	104.826.949	72.130.564	21.994.585	22.204.706	87.737.315	462.942.252	
		BELANJA BARANG	11.330.486	14.364.077	18.755.997	21.341.728	21.349.711	18.493.173	44.628.699	102.970.095	70.069.419	21.382.974	21.687.892	87.711.591	454.091.842	
		BELANJA MODAL	3.000	26.169	254.709	482.835	886.299	500.618	1.624.632	1.856.855	2.061.144	611.611	516.814	25.724	8.850.410	
		024.11.DG.6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	18.122	584.194	1.614.230	1.554.835	1.216.779	1.343.648	2.003.422	2.003.097	2.066.288	1.904.918	1.610.548	1.080.001	17.000.082
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	18.122	584.194	1.614.230	1.554.835	1.216.779	1.343.648	2.003.422	2.003.097	2.066.288	1.904.918	1.610.548	1.080.001	17.000.082	
		024.11.DS.6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	64.317	520.206	3.389.726	5.807.639	5.342.346	2.441.505	25.895.816	84.092.015	51.208.600	3.345.124	4.749.165	68.037.181	254.893.640
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	64.317	520.206	3.350.837	5.386.528	5.342.346	2.441.505	25.895.816	84.092.015	51.208.600	3.345.124	4.749.165	68.037.181	254.433.640	
		024.11.DS.6834	53 BELANJA MODAL	0	0	38.889	421.111	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
		024.11.DS.6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1.416.071	1.418.049	1.424.888	1.435.621	1.454.341	1.474.379	1.496.796	1.503.929	1.464.546	1.469.145	1.476.269	1.671.766	17.705.800
52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.416.071	1.418.049	1.424.888	1.435.621	1.454.341	1.474.379	1.496.796	1.503.929	1.464.546	1.469.145	1.476.269	1.671.766	17.705.800			
024.11.DS.6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	22.210	1.033.877	1.093.042	1.131.892	1.156.461	1.156.461	1.072.833	1.074.212	1.016.327	986.446	986.446	642.617	11.372.825		
52 BELANJA BARANG DAN BARANG	22.210	1.033.877	1.093.042	1.131.892	1.156.461	1.156.461	1.072.833	1.074.212	1.016.327	986.446	986.446	642.617	11.372.825			
024.11.DS.6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.105.136	61.238.950	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS.3072-2392-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
024.11.DS.6837		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.103.074	5.105.136	61.238.950
		Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	534.678	703.590	790.817	1.035.027	1.150.242	1.168.655	2.210.607	2.210.289	2.288.777	1.664.062	1.311.924	3.856.367	18.925.036	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	534.678	703.590	790.817	1.035.027	1.150.242	1.168.655	2.210.607	2.210.289	2.288.777	1.664.062	1.311.924	3.856.367	18.925.036	
		024.11.WA.6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	4.181.014	5.027.255	5.595.129	5.756.273	6.812.767	6.306.069	8.470.782	8.840.333	8.982.952	7.521.816	6.967.281	7.344.247	81.805.919
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.178.014	5.001.087	5.379.309	5.694.549	5.926.469	5.805.450	6.846.150	6.983.478	6.921.808	6.910.205	6.450.467	7.318.523	73.415.509	
53 BELANJA MODAL	3.000	26.169	215.820	61.724	886.299	500.618	1.624.632	1.856.855	2.061.144	611.611	516.814	25.724	8.390.410			

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttt.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
IV A. B L O K I R**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 88.644.108 52 Belanja Barang Rp. 88.644.108		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 179.400 Pelaksanaan Belanja Honorarium menunggu penambahan anggaran perjadiin pada tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan
6804.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 531.650 Pelaksanaan belanja bahan menunggu penambahan anggaran perjadiin pada pagu tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000 Pelaksanaan belanja bahan menunggu penambahan anggaran perjadiin pada pagu tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.500 Pelaksanaan belanja bahan menunggu penambahan anggaran perjadiin pada pagu tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	6833.AEA	Koordinasi 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.000.000 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
6804.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 84.753 Pelaksanaan Belanja Bahan menunggu penambahan anggaran perjadiin pada tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.200 Pelaksanaan Belanja Sewa menunggu penambahan anggaran perjadiin pada tahun berjalan Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	6833.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.675 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.000 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.050.730 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 154.368 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 109.950

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
IV A. B L O K I R**



DS:3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.244.745 Tidak sesuai ketentuan penggunaan BAS Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	6836.AEC	Kerja sama 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.500.000 Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan
6834.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan 522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000 Tidak sesuai dalam penerapan kaidah penganggaran Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.150.430 Tidak sesuai dalam penerapan kaidah penganggaran Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	6837.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.670.109 Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	024.11.WA	Program Dukungan Manajemen
6835.AEA	Koordinasi 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 73.348 Alokasi harus dilengkapi dasar justifikasi pengalokasiannya Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 261.800 Alokasi harus dilengkapi dasar justifikasi pengalokasiannya Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 361.450 Tidak sesuai SBM 2024 Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

td.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2024
IV B. C A T A T A N**



DS.3072-2592-6163-4006

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN		
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen		
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	3.889.930
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan kend roda 4 sebanyak 1 unit dan kend roda 6 sebanyak 1 unit	Rp.	1.267.630
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Rehab Gedung ex P2P phase 2 seluas 4.882 m2	Rp.	2.622.300

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

tttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR KONTRIBUTOR

Tim Pengarah:

1. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Editor:

1. *Project Monitoring Officer* (PMO) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran

Tim Penyusun:

1. Sari Ramadhani
2. Fairuz Wardaty
3. Titin Delia
4. Martin Lasty Marbun

Desain dan Cover:

Ahdiyati Firmana

